

LAPORAN NOTULA

Rapat Pendalaman Usulan Akuntabilitas Anggaran Program Perubahan Iklim dan Memperkuat Partisipasi Masyarakat Melalui Optimalisasi Mekanisme Penanganan Pengaduan Sektor Pertambangan

Kamis, 22 September 2022 – Pukul: 15.00 – 17.00

PENDAHULUAN

PWYP, Tifa, dan Koalisi ResponsiBank mengusulkan rencana aksi terkait Akuntabilitas Anggaran Program Perubahan Iklim pada RAN OGI VII 2023 – 2024. Sementara itu, di dalam *working group* yang sama PWYP dan ICEL mengusulkan usulan komitmen Memperkuat Partisipasi Masyarakat Melalui Optimalisasi Mekanisme Penanganan Pengaduan Sektor Pertambangan dengan melibatkan direktorat terkait di Bappenas yakni Direktorat Lingkungan Hidup dan Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan.

TUJUAN

Rapat pendalaman usulan mendorong keterbukaan kontrak pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk:

1. Mendiskusikan kesesuaian usulan komitmen dengan perencanaan pada direktorat terkait;
2. Mendiskusikan kesesuaian usulan rencana aksi dengan rencana kerja K/L terkait.

PEMBAHASAN

1. **Theo** selaku perwakilan dari Sekretariat *Open Government Indonesia* menyampaikan pengantar sebagai berikut:
 - *Open Government Indonesia* merupakan bentuk inisiatif pemerintah Indonesia dalam melaksanakan praktik *Open Government Partnership* (OGP) yang dimulai sejak 2011, untuk mempromosikan nilai-nilai transparansi, partisipasi, inovasi, akuntabilitas, dan inklusif;
 - Sekretariat Nasional OGI dibentuk untuk memfasilitas pencapaian RAN OGI lewat koordinasi dan konsolidasi dengan para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah;
 - Telah terdapat 6 Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah (RAN OGI) sejak tahun 2011 – 2022 saat ini dimana setiap periode RAN tersebut memiliki berbagai macam bentuk fokus isu dengan banyak poin-poin komitmen. Pada RAN OGI VII Tahun 2023 – 2024 telah dipetakan 6 isu strategis dimana salah satunya isu Energi, Lingkungan, dan Sumber Daya Alam;
 - Rancangan penyusunan RAN OGI VII dilakukan mulai dari pengajuan, penelaahan, diskusi dengan Dit. Terkait, diskusi K/L, dan finalisasi RAN OGI VII
 - Usulan proposal yang akan dibahas adalah mengenai Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penanganan Perubahan Iklim serta satu usulan lagi mengenai Memperkuat Partisipasi Masyarakat Melalui Optimalisasi Mekanisme Penanganan Pengaduan Sektor Pertambangan;
2. **Bapak Aryanto Nugroho** dari PWYP menyampaikan pembahasan sebagai berikut:
 - Informasi terakhir yang didapatkan dari OGI dan Stranas-PK belum semua kabupaten/kota terintegrasi dengan SP4N Lapor, mekanisme penanganan pengaduan sektor pertambangan sudah terintegrasi dengan Lapor di Kementerian ESDM;

- Tidak pernah ada kontak khusus apabila masyarakat ada pelaporan di lapangan, rata-rata masyarakat sekitar tambang adalah daerah-daerah remote yang tidak ada jaringan internet (uji coba pernah dilakukan PWYP di 3 daerah di Aceh, Kutai, dan Konawe Utara)
 - Bagaimana agar keluhan dari masyarakat sekitar daerah pertambangan dapat terakomodir dan bagaimana agar masyarakat tersebut terpenuhi wawasannya mengenai mekanisme pelaporan;
 - Ada 2 instansi yang sangat berkaitan yakni Kemenlhk dan Kemen ESDM yakni Ditjen Minerba, seringkali laporan yang masuk bias antara domain Kemenlhk dan Ditjen Minerba. Siapa yang akan menentukan laporan sektor pertambangan tersebut masuk ke ranah pihak mana?;
 - Main issues yang akan didorong: 1) Akses masyarakat sekitar tambang mengenai mekanisme penanganan pengaduan untuk masyarakat sekitar tambang 2) mekanisme penanganan pengaduan dalam hal integrasi 2 kementerian di lingkup kemenlhk dan esdm;
3. **Bapak Antonius Aditanyo** selaku perwakilan dari ICEL menyampaikan paparan sebagai berikut:
- Mekanisme pengaduan dari KLHK cukup oke untuk memperjelas koordinasi dari mekanisme pengaduan (akan ada penanganan pengaduan bersama tetapi perlu dilihat lebih lanjut lagi untuk melihat respon kedua kementerian terkait)
4. **Bapak Dedi Rustandi** selaku perwakilan Dit. SEMP Bappenas menyampaikan pembahasan sebagai berikut:
- Terkait pengaduan masyarakat secara umum ada di SP4N Lapor tetapi untuk spesifik ESDM belum ada;
 - Bagaimana hasil evaluasi tahun sebelumnya mengenai apa yang perlu dikembangkan Dit. SDEMP meminta untuk dikirimkan bahasan tertulisnya
 - KLHK sedang membuat tim penanggulangan pencemaran lingkungan yang punya daerah prioritas;
 - Mekanisme penanganan pengaduan di sekitar masyarakat pertambangan memang belum ada di KLHK.
5. **Sesi Diskusi Usulan Rencana Aksi I** menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
- Adanya dualisme regulasi menyebabkan mekanisme pengaduan untuk pertambangan sering tidak jelas apakah berada di ranah KLHK atau ESDM, namun biasanya ESDM tidak terlalu rigid dalam menentukan kriteria penanganan pengaduan sementara lebih concern ke pencemaran dalam konteks pertambangan;
 - Diperlukan forum koordinasi antara esdm dan klhk agar kedua instansi tersebut merespon dan dapat terpetakan apakah ada keterbatasan pengawasan;
 - Ditjen Gankum sudah memiliki aplikasi yang bergerak melalui pelaporan dan pengaduan, maka perlu identifikasi tindak lanjut tidak optimalnya pelaporan pengaduan kekurangannya di bagian mana apakah di kualitas laporannya atau penanganannya, jangan sampai menambah platform yang sudah ada sehingga tumpang tindih dan masing-masing platform malah menjadi tidak efektif;
 - Sistem pengaduan sudah ada SP4N Lapor yang menjadi aplikasi yang dimanfaatkan secara nasional;
 - Fokus masalah yang ingin didiskusikan mengenai akses bagi masyarakat di sekitar tambang yang jauh dari akses listrik dan internet untuk melakukan pengaduan dan mekanisme penanganan pengaduannya akan seperti apa;
 - Mekanisme pelaporan selain online bisa melibatkan pemerintah daerah lewat

- Dinas LH, untuk pertambangan selain pertambangan rakyat memang complaint handlingnya sudah dialihkan ke pusat;
- Menenai isu akses pengaduan masyarakat masuk ke dalam RO Pengawasan, KLHK juga memiliki Balaigakum di tingkat regional;
 - ICEL dan Gankum KLHK membuat MoU yang salah satu klausulnya penguatan sistem pengaduan masyarakat.
6. **Bapak Oslan** selaku perwakilan dari Tifa menyampaikan pembahasan sebagai berikut:
- Hal yang didorong di dalam usulan rencana aksi ialah seberapa besar pendapatan negara dari penanganan iklim dan ada berapa program yang masuk di negara serta berapa besar carbon offset yang sudah dilakukan;
 - Masyarakat juga harus tau program pemerintah dalam hal iklim dan bagaimana pembiayaannya serta bagaimana mekanisme pengawasan masyarakat;
 - Modalitas: RAN penurunan gas kaca, kebijakan pembangunan rendah karbon, kelembagaan yang dibangun untuk mewujudkan penanganan iklim untuk menurunkan karbon hingga 41%;
 - Tifa sedang membangun komunikasi dengan staf ahli menteri terkait possibility keterbukaan terkait carbon tax dan alokasinya kemana.
7. **Sesi Diskusi Usulan Rencana Aksi II** menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
- BKF sudah memiliki inisiasi CCFP dimana di dalam dashboard CCFP mengumpulkan stakeholders pendanaan perubahan iklim salah satunya ada Sekretariat ICCTF untuk pengelolaan dana
 - Bappenas telah memiliki website “Aksara” sebagai website pelaporan aksi terkait iklim, namun di renja KLHK memang belum ditemukan kegiatan rutin untuk transparansi pendanaan iklim;
 - Kegiatan pembangunan rendah karbon di Aksara (yang sepanjang tahun selalu dimaintenance) adalah kegiatan yang diinput K/L dan Pemda, tetapi sedang dikembangkan agar kegiatan non-state actors dapat dimasukkan di dalamnya.
 - Diperlukan penambahan kegiatan konkrit untuk meningkatkan transparansinya itu seperti apa;
 - Komitmen tentang dana iklim memang merupakan usulan baru akan tetapi sudah pernah ada komitmen mengenai lingkungan hidup sebelumnya;
 - Perlu adanya platform bersama yang mencakup informasi pendanaan dan program bisa diakses oleh publik;
 - Sumber dana untuk pendanaan iklim memang terpecah tetapi di tiap pengelola dana baik K/L sudah pasti masing-masing punya mekanisme transparansi dana. Rekan direktorat terkait juga meminta pandangan dari rekan-rekan CSO juga untuk peningkatan platform aksara;
 - Manfaat dari transparansi dana iklim ialah untuk menutup peluang korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, utamanya perlu diketahui bagaimana pengelolaan sumber dana untuk sumber dana yang bukan bersumber dari APBN (audit sosial akan bisa dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas saat platform dana iklim itu transparan)

KESIMPULAN

Mekanisme penanganan pengaduan untuk sektor pertambangan khususnya bagi masyarakat sekitar daerah pertambangan tidak cukup aksesibel. Selain itu adanya dualisme regulasi menyebabkan pengaduan yang masuk terkadang masih kabur apakah masuk ke dalam kewenangan ESDM atau KLHK. Mekanisme penanganan pengaduan masuk ke RO KLHK di lingkup pengawasan, sementara untuk adanya tumpang tindih dan kekaburan kewenangan perlu diadakan forum diskusi kolaboratif antara ESDM dan KLHK untuk mengetahui dan memetakan yang mana yang menjadi ranah masing-masing kementerian. Untuk usulan rencana aksi kedua mengenai dana iklim, perlu adanya platform bersama yang mencakup informasi pendanaan dan program yang dikerjakan untuk dapat diakses oleh publik. Bappenas sendiri

telah memiliki website “Aksara” sebagai website pelaporan aksi terkait iklim, namun di renja KLHK memang belum ditemukan kegiatan rutin untuk transparansi pendanaan iklim.

DOKUMENTASI

